

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agusmidah. 2010. *Dinamika Dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Ghalia 30 Indonesia. Bogor.
- Aloewic, Tjepi F.. 1996. *Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penyelesaian Perselisihan Industrial*. BPHN. Jakarta.
- Asikin, Zainal. 1993. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. PT Grafindo Persada. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. UI Press. Jakarta.
- Harahap, Yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hernawan, Ari. 2019. *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial*. UII Press. Yogyakarta.
- Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT Grafindo Persada. Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Jehani, Libertus. 2006. *Hak-Hak Pekerja Bila DiPHK*. Visi Media. Jakarta.
- Khakim, Abdul. 2010. *Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Teori Dan Pelaksanaan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lothion, Tamara. 1986. *The Political Consequences Of Labor Law Regimes: The Contractualist And Corporatist Models Compared*. Cardozo Law Review. Columbia.
- Manan, Bagir. 2009. *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian*. Asosiasi Advokat Indonesia. Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Legal Research*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Manullang, Sendjun H. 2001. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Marzuki, Suparman. 2012. *Kekuasaan Kehakiman: Independensi, Akuntabilitas, Dan Pengawasan Hakim*. Bunga Rampai Komisi Yudisial. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- 1986. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Molenaar, Mr. A. N.. 1953. *Arbeidsrecht I*. W. E. J. Tjeenk Willink. Zwolle.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Metode Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Nasution, Bahder Johan. 2015. *Hukum Dan Keadilan*. Mandar Maju. Bandung.
- Panggabean, Mutiara S.. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indah. Bogor Selatan.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press. Jakarta.
- Rawls, John. 1999. *A Theory Of Justice*. The Belknap Press of Harvard University. Cambridge.
- Ridwan H. R.. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Robingu, Yuhari. 2009. *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Rajawali Pers. Jakarta.

Soepomo, Imam. 1999. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan. Jakarta.

Subekti. 1977. *Aneka Perjanjian*. Alumni. Bandung.

Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Widodo, Hartono dan Judiantoro. 1992. *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*. Rajawali Pers. Jakarta.

Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad, 1847, No. 23).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2002, Amandemen IV).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2003, No. 39).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2004, No. 6).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2004, No. 131).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2014, No. 292).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2015, No. 237).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.31/Men/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit (Berita Negara Republik Indonesia, 2008).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia, 2016, No. 375).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-150/Men/2000 *juncto* Kep-78/Men/2001 *junctis* Kep-111/Men/2001 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2000-2001).

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor 421 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor 583 K/Pdt.Sus-PHI/2016.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst..

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Yyk.

D. Surat

Kontra Memori Kasasi, 28 April 2016.

Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Perkara Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Yyk.

Jawaban Tergugat. 8-3-2016.

Permohonan Sita Jaminan. 12-2-2016.

E. Penelitian

Arlinesari, Nathania. 2018. “Analisis Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Pada PT Bank Jaya Abadi (Persero) Tbk (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang No. 39/Pdt.Sus.PHI/G/2014/PHI.Smg dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya No. 86/G/2016/PHI.Sby)”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Damayanti, Vita. 2014. “Analisis Yuridis Atas Kekuatan Mengikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 828/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 54/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst)”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

F. Jurnal

Uwiyono, Aloysius. 2003. “Implikasi Hukum Pasar Bebas Dalam Kerangka AFTA Terhadap Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Bisnis*. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Jakarta.

G. Internet (*Website*)

716, Http. 2016. “20 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli”. <https://http716.wordpress.com/2016/10/29/20-pengertian-hukum-menurut-para-ahli/>.

Asmana, Abi. 2015. “Definisi Hukum Perburuhan Menurut Para Ahli”. <http://legalstudies71.blogspot.com/2015/09/difinisi-hukum-perburuhan-menurut-para.html>.

H. R. S., 2013. “Pendiri Primagama Dinyatakan Pailit (Lantaran proses perdamaian dalam status PKPU tidak tercapai)”. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51b9d9ccf1ea1/pendiri-primagama-dinyatakan-pailit>.

Hernawan, Ari. 2018. “Guru Besar Hukum Perburuhan UGM: Mogok Buruh Freeport Sah, PHK Harus Dibatalkan”. <https://www.koranperdjoeangan.com/guru-besar-hukum-perburuhan-ugm-mogok-buruh-freeport-sah-phk-harus-dibatalkan/>.

Nurhidayati, Meila. 2013. “Negara Hukum”.
<https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia/>.

Primagama, 2019. “Sejarah Primagama”.
<https://www.primagama.co.id/about-us/history>.

Sidqie, Muhamad Hakim. 2014. “Asas-Asas Dalam HAN”.
<http://sidqioe.blogspot.com/2014/06/asas-asas-dalam-hukum-administrasi.html>.

H. Kamus

Subarna, H. M. dan Sunarti. 2012. “Kamus Umum Bahasa Indonesia Lengkap”. CV Pustaka Grafika. Jakarta.